

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Dalam rangka penggantian Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) harus dilakukan cek fisik kendaraan guna identifikasi kelayakan dan kesesuaian data kendaraan bermotor. Berdasarkan observasi dari penulis dilapangan terjadi ketidaksesuaian antara peraturan dengan fakta yang terjadi dilapangan, menurut Peraturan Kepala Kepolisian RI Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor pengecekan fisik harus meliputi *pertama*, aspek kelengkapan dan fungsi keselamatan, *kedua* aspek identitas, sedangkan fakta yang terjadi dilapangan hanya sebatas aspek identitas Ranmor yaitu penggesekan nomor rangka dan nomor mesin dan tidak melakukan pengecekan dari aspek kelengkapan dan fungsi keselamatan yaitu karoseri/rancang bangun sesuai standar, lampu-lampu, kaca spion, dimensi Ranmor sesuai standar, kondisi ban, dan panel control

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan cek fisik kendaraan roda dua di kantor SAMSAT dan dampak dari tidak dilakukannya cek fisik secara konstitusional.

Jenis penelitian hukum sosiologis (Yuridis Sosiologis), sifat penelitian deskriptif. Lokasi penelitian di Kantor SAMSAT Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, kemudian metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan angket.

Hasil penelitian pelaksanaan cek fisik kendaraan bermotor di kantor SAMSAT Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian RI Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor tidak sesuai antara peraturan dengan pelaksanaan di lapangan dalam pengecekan fisik kendaraan bermotor yang dilakukan oleh petugas SAMSAT, mereka hanya melakukan pengecekan dari aspek kesesuaian identitas Ranmor dan tidak melakukan pengecekan terhadap aspek kelengkapan dan keselamatan Ranmor sehingga menimbulkan dampak positif dan negatif, dampak positifnya yaitu mempercepat proses penggantian STNK, dan mempermudah dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan sedangkan dampak negatifnya meningkatkan angka kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas serta kualitas berkendara di jalan raya.